



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 32 TAHUN 1990 SERI : D NO. 24

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 6 TAHUN 1989**

T E N T A N G

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1989/1990**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 4 Juli 1950);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-481 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 05/I/PAR/III/DPRD/78-79 tanggal 7 Juni 1978 jo. Nomor : 01/PAR/-I/DPRD-Pem.87/87-88

tanggal 21 Juli 1987 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990.

Mendengarkan : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 6 Desember 1989.

2. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Desember 1989.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990

Pasal 1

- (1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 527.943.271.800,00 diperkirakan berkurang dengan
Rp. 4.431.621.000,00 sehingga menjadi
Rp. 523.511.650.800,00;
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 527.943.271.800,00 diper-

kirakan berkurang dengan Rp. 4.431.621.000,00 sehingga menjadi Rp. 523.511.650.800,00 dengan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum

| | | |
|-----------------|----|--------------------|
| perubahan | Rp | 467.894.900.800,00 |
| Berkurang | Rp | 7.070.686.000,00 |

Belanja Rutin setelah

| | | |
|-----------------|----|--------------------|
| perubahan | Rp | 460.824.214.800,00 |
|-----------------|----|--------------------|

b. Belanja Pembangunan sebelum

| | | |
|-----------------|-----|-------------------|
| perubahan | Rp. | 60.048.371.000,00 |
| Bertambah | Rp | 2.639.065.000,00 |

Belanja Pembangunan

| | | |
|-----------------------|-----|-------------------|
| setelah perubahan ... | Rp. | 62.687.436.000,00 |
|-----------------------|-----|-------------------|

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 523.511.650.800,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula
Rp.217.344.199.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 15.125.356.000,00 sehingga menjadi Rp 232.469.555.000,00
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1). **Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula**
Rp 217.344.199.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp.15.125.356.000,00 sehingga menjadi Rp 232.469.555.000,00 dan dirinci sebagai berikut:

a. Belanja Rutin sebelum
 perubahanRp. 213.305.661.000,00
 BertambahRp 13.038.104.000,00

Belanja Rutin setelah
 perubahanRp. 226.343.765.000,00

b. Belanja Pembangunan sebelum
 perubahanRp 4.038.538.000,00
 BertambahRp 2.087.252.000,00

Belanja Pembangunan
 setelah perubahan ...Rp .6.125.790.000,00

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 21 Desember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
 KETUA

ttd

IR. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

ttd

ISMAIL

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya tanggal
 10 Pebruari 1990 Nomor 903.33 - 092.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
 Jawa Tengah Nomor : 32 Tanggal : 3 Maret 1990
 Seri : D No. : 24

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

ttd

Ir. S U J A M T O.

NIP.010 028 643.

RINGKASAN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1989/1990

| No | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH (BERKURANG) | No | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN | JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | BERTAMBAH (BERKURANG) |
|----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| A. | PENFRIMAAN DARI DAERAH | | | | A. | PENGELUARAN RUTIN | | | |
| 1. | Bagian sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun yang lalu..... | 8.679.271.000,00 | 13.456.859.000,00 | 4.777.588.000,00 | 1. | Belanja Pegawai | 402.534.260.000,00 | 402.609.216.000,00 | 74.956.000,00 |
| 2. | Bagian Pendapatan Asli Daerah: | | | | 2. | Belanja Barang | 25.892.774.800,00 | 27.447.618.800,00 | 1.554.844.000,00 |
| a. | Pajak Daerah | 50.187.300.000,00 | 55.456.499.000,00 | 5.269.190.000,00 | 3. | Belanja Pemeliharaan | 4.168.677.000,00 | 4.586.802.000,00 | 418.125.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | 8.988.909.000,00 | 9.489.934.000,00 | 501.025.000,00 | 4. | Belanja Perjalanan Dinas | 2.008.540.000,00 | 2.130.585.000,00 | 122.044.000,00 |
| c. | Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah | 2.476.035.000,00 | 2.414.129.000,00 | (61.906.000,00) | 5. | Belanja Lain-lain | 9.376.029.000,00 | 9.951.073.000,00 | 575.044.000,00 |
| d. | Penerimaan dari Dinas-dinas | 835.535.000,00 | 775.576.000,00 | 30.855.000,00 | 6. | Angsuran Pinjaman/hutang dan bunga | 1.991.070.000,00 | 2.137.932.000,00 | 146.862.000,00 |
| e. | Penerimaan Lain-lain | 262.610.000,00 | 747.828.000,00 | 512.966.000,00 | 7. | Belanja Pensiun | 13.206.954.000,00 | 182.850.000,00 | (13.024.104.000,00) |
| | Jumlah 2: | 62.750.389.000,00 | 69.002.528.000,00 | 6.252.139.000,00 | 8. | Ganjaran/Subsidi/Sumbangan kepada Daerah Bawahan | 6.490.089.000,00 | 7.055.043.000,00 | 564.954.000,00 |
| 3. | Bagian Bagi Hasil pajak: Bukan Pajak: | | | | 9. | Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain | 970.689.000,00 | 3.466.243.000,00 | 2.495.554.000,00 |
| a. | Bagi Hasil Pajak | 5.749.020.000,00 | 5.749.020.000,00 | - | 10. | Pengeluaran tidak terduga | 255.818.000,00 | 1.256.852.000,00 | 1.034.000.000,00 |
| b. | Bagi Hasil Bukan Pajak | 2.706.809.000,00 | 2.130.000.000,00 | (576.809.000,00) | | JUMLAH RUTIN (A): | 467.894.900.800,00 | 460.824.214.800,00 | (7.070.686.000,00) |
| | Jumlah 3: | 8.455.829.000,00 | 7.879.020,00 | (576.809.000,00) | B. | PENGELUARAN PEMBANGUNAN | | | |
| 4. | Bagian Sumbangan dan Bantuan: | | | | 1. | Murni 18 Sektor | 58.011.621.000,00 | 60.566.558.000,00 | 2.554.937.000,00 |
| a. | Sumbangan | 433.940.782.800,00 | 421.173.243.800,00 | (12.767.539.000,00) | 2. | Subsidi/bantuan pembangunan kepada Daerah Bawahan | 2.036.750.000,00 | 2.120.878.000,00 | 84.128.000,00 |
| b. | Bantuan | 14.177.000.000,00 | 12.000.000.000,00 | (2.117.000.000,00) | 3. | Pembayaran kembali pinjaman | - | - | - |
| | Jumlah 4: | 448.057.782.800,00 | 433.173.243.800,00 | (14.884.539.000,00) | | JUMLAH PEMBANGUNAN (B): | 60.048.371.000,00 | 62.687.436.000,00 | 2.639.065.000,00 |
| 5. | Bagian Penerimaan Pembangunan: | | | | | JUMLAH (A + B): | 527.943.271.800,00 | 523.511.650.800,00 | (4.431.621.000,00) |
| a. | Pinjaman Pemerintah Daerah | - | - | - | | | | | |
| b. | Pinjaman untuk Badan Usaha Milik Daerah | - | - | - | | | | | |
| | Jumlah 5: | - | - | - | | | | | |
| | JUMLAH 1 s.d 5 | 527.943.271.800,00 | 523.511.650.800,00 | (4.431.621.000,00) | | | | | |

**DAFTAR : PENGGESERAN PASAL-PASAL YANG
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG-
AN YANG BERLAKU.**

| NO. URUT | JENIS BELANJA | PASAL-PASAL | KETERANGAN |
|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Belanja Barang | 1011 sampai dengan 1050 | |
| 2. | Belanja pemeliharaan. | 1051 sampai dengan 1070 | |
| 3. | Belanja perjalanan Dinas | 1071 sampai dengan 1080 | |
| 4. | Belanja lain-lain | 1081 sampai dengan 1100 | |